

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Desa tidak hanya tempat romantisme mengenang masa kecil, dengan biasanya yang dikunjungi setahun sekali disaat mudik lebaran. Desa belum mampu menawarkan daya tarik kepada warganya yang telah pergi ke kota dengan tujuan mencari penghidupan baru.

Desa sebagaimana konstitusi sebelumnya memakai norma yang sudah terdapat pada UU No 5 tahun 1979 perihal pemerintahan Desa serta UU nomor 32 tahun 2004 ialah struktur pemerintahan terendah dibawah kabupaten. Desa mendapatkan tugas perbantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota. Menjadi organisasi pemerintahan kabupaten/kota maka kedudukan Desa sebagai *local state governance*.¹

Reformasi yang dilakukan guna mewujudkan aparatur negara serta bisa menunjang keterpaduan serta kelancaran terlaksananya tugas beserta fungsi penyelenggara aparatur negara serta pembangunan. Terlaksananya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah suatu keinginan sekaligus harapan seluruh bangsa didunia.²

Desentralisasi memungkinkan berlangsungnya perubahan fundamental pada karakteristik rekanan kekuasaan antara wilayah sentra menggunakan wilayah-wilayah yang terdapat dalam kabupaten atau kota yang diberikan kekuasaan untuk membangun keputusan-keputusan politik tanpa harus dalam intervensi oleh sentra. Pada level lokal, pergeseran itu didorong pada perubahan konstitusional yang dibawa oleh UU No.22 tahun 1999 dan UU No. 25 tahun 1999. Lain dari pada itu menggunakan aturan politik desa sebelumnya tidak diatur pada Undang-Undang tersendiri melainkan dimasukkan pada kerangka Undang-Undang otonomi daerah. Terlebih itu didesak pada pembaruan regulatif, pergeseran politik tingkat lokal pula didukung pada membesarnya tingkat kontribusi warga pada metode politik desa. Dalam sebagian momen pada periode pembaruan, bermunculan aktivitas perlawanan yang dilaksanakan pada

¹ Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 *tentang Pemerintahan Daerah*

² Dwiyanto Agus (ed).2008. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjia Mada Universitas Press, h 21

masyarakat buat mendesak keterlibatan warga pada pembuatan kebijakan ataupun aktivitas-aktivitas yang jarang diselenggarakan dalam mendesak tanggung jawab pemimpin publik desa.

Pada level empiris, penerepan UU No 22 tahun 1999 mengakibatkan keterlibatan yang relatif luas dijenjang lokal. keterlibatan pertama berkaitan pada perubahan interaksi desa serta pemerintah kabupaten atau kota, pemerintahan provinsi serta pemerintah pusat. Keterlibatan kedua menyinggung transformasi pada tata interaksi disela-sela forum serta kekuatan pada desa.

“Dalam peraturan pemerintahan No.22 Tahun 1999 menyatakan bahwa Badan Perwakilan Desa (BPD) sesuai pasal 104 adalah orang yang dipilih masyarakatnya sendiri yang dipercayai dapat mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, dan mengawasi penyelenggaraan pemerinthan desa.”³

Sebagai ilmu sejarah, desa adalah asal mula terbentuknya masyarakat politik serta pemerintahan di indonesia jauh sebelum terbentuknya negara nasional. Bentuk sosial jenis desa, masyarakat adat, dll. Telah membentuk lembaga sosial yang menempati kedudukan yang sangat penting. “Desa adalah lembaga otonom dengan tradisi, adat istiadat, dan hukumnya sendiri dan relatif mandiri, hal ini dibuktikan antara lain dengan tingginya tingkat keragaman yang membuat desa mungkin berbentuk khas negara”.⁴Desa merupakan bentuk tradisional dari pemerintahan yang masih bisa bertahan pada nilai budaya, sejarah maupun adat.

Desakan masyarakat pada pelayanan publik yang baik tidak terlepas pada pelaksanaan pemerintahan yang baik, termasuk pada daerah kelurahan yang bersangkutan langsung oleh warga, keluh kesah pada tidak baiknya kualitas layanan di kelurahan membuktikan bahwa kurang mampu terlaksananya pemerintahan yang baik pada proporsi kelurahan.

Kepemimpinan yang baik adalah salah satu evolusi penyelenggaraan pemerintahan dari perubahan pemerintah ke perubahan pemerintah yang baik pada sistem pemerintahan. Pemerintahan yang baik ini mengarah ke lebih positif serta tepat pada proses serta tujuan agar bisa dikategorikan sebagai suatu

³Haw Widjaja. Op. Cit. Hal 13

⁴R.H Unang Sunarjo, 1984. *Pemerintahan Desa dan Kelurahan*, Bandung: Tarsito,.Hal.6.

proses pemerintah yang baik serta dapat digunakan di seluruh negara maka pemerintahan yang baik dapat menyeimbangkan keselarasan pemerintah dengan pihak lain dalam sektor guna menciptakan suatu struktur untuk melaksanakan pemerintahan yang baik maupun bersih.

Bersumber pada peraturan pemerintah No. 72 Tahun 2005 yang memaparkan pemerintahan desa ini diterbitkan yakni melakukan ketentuan pasal 216 ayat 1 UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, lalu uraian yang ada pada paragraf 2 pasal 14 ayat 1 mengemukakan maka tugas kepala desa ialah melaksanakan urusan pemerintahan, pembangunan serta kemasyarakatan. “ Dalam melaksanakan tugasnya itu, kepala desa mempunyai wewenang yaitu memimpin penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Perwakilan Desa (BPD), mengajukan rancangan peraturan desa, menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD, menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDdesa) untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD, membina kehidupan masyarakat desa, mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif, mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakili sesuai dengan peraturan perundang undangan, melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang undangan”.⁵ Pada metode pembangunan desa sangat butuh ditingkatkan kaitannya lebih idealis ditengah institusi desa. “Dengan kalimat lain perlu dibangun adanya partisipasi yang menyeluruh dan saling menguatkan antar lembaga yang ada di desa. Dalam bahasa akademis hubungan yang saling menguatkan tersebut dikenal dengan istilah tata pemerintahan yang baik (*good governance*)”.⁶

Terbentuknya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) ialah keinginan seluruh negara di dunia. Lebih dari itu, warga mengharuskan supaya pemerintah dapat membagikan kepedulian yang benar-benar untuk memusnahkan aksi-aksi korupsi, kolusi serta nepotisme, maka dari itu

⁵Beratha I Nyoman. 1992. *Desa, Masyarakat Desa dan Pembangunan*. Jakarta: Ghalia Indonesia. Hal. 23.

⁶Prathama Raharja. 2001. *Pemberdayaan dan pengembangan masyarakat desa*. Jakarta: UI Hal. 203

menciptakan pemerintahan yang bersih serta dapat mempersiapkan pelayanan yang sempurna seperti yang diharapkan masyarakat.

Tata kelola pemerintahan yang baik adalah aparatur pemerintah atau moral, dan terlepas pada keahlian aparatur pemerintah yang dapat mempersembahkan pelayanan secara sederhana, cepat, serta akurat dalam biaya yang terjangkau. Selain itu, pada penyelenggaraan pemerintahan, keterbukaan dan transparansi organisasi pemerintahan sangat diperlukan dalam rangka membangun rasa saling percaya disela-sela pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi serta untuk memudahkan menerima informasi yang akurat serta tepat guna.⁷

Bertambahnya fakta tata kelola pemerintahan yang buruk (*bad governance*) menghasilkan kepentingan untuk melaksanakan penggantian tata pemerintahan, mengarah tata pemerintahan yang lebih baik (*good governance*), maka dari itu perubahan tata pemerintahan yang wajib dikoreksi terdapat 2 level. “pertama ditingkat desa, harus ditingkatkan *good governance* yang mengharuskan keikutsertaan semua komponen desa pada urusan publik, pengelolaan pemerintah dan menetapkan keperluan desa, supaya terwujud kesejahteraan sosial, baik menurut bidang ekonomi, politik maupun sosial. Pada perpindahan paradigma menurut konsep *government* ke *governance*, lalu metode pengelolaan pemerintahan desa sebaiknya berlandaskan dalam *truste* (saling kepercayaan) dan *Partnership* (teman kerja) antara elemen pada masyarakat (*stake holders*). Karena terlepas, masing-masing *problem* yang berlangsung pada proses pengelolaan pemerintahan tidak dapat dipecahkan oleh pemerintahan desa saja. Jadi aparatur desa wajib bekerja sama dengan warga dengan prinsip teman kerja. Pada upaya menciptakan *truste* serta *partner* kerja maka tidak terjadi jalan lain selain menapakkan proses pengelolaan pemerintahan desa dalam asas-asas tersebut yaitu : partisipasi, merupakan dimana pada pengelolaan pemerintahan desa dapat menyertakan semua warga, serta transparansi atas proses pemerintahan maupun pembangunan, hingga kini setiap perubahan bisa didapati oleh semua warga, amanah setiap peraturan yang dibuat oleh

⁷Imawan, Riswanda, 2002, “*Desentralisasi, demokratisasi, dan Pembentukan Good Governance*”, Makalah, Jakarta, h 9

pemerintahan desa wajib dapat di pertanggungjawabkan pada publik maupun kepada warga, dengan cara hukum, politik ataupun moral. Kedua, pada tingkatan tata hubungan desa dengan supra desa (kabupaten-Provinsi), harus ditingkatkan sebuah proses yang dapat menyampaikan kepada kepentingan desa dalam lingkungan politik supra desa secara partisipatif”.⁸

Kepemerintahan yang baik (*good governance*) ialah salah satu berita fundamental yang amat utama pada pembahasan pengelolaan pemerintahan, desakan-desakan yang dibuat oleh warga pada pemerintah untuk mengupayakan pemerintahan yang baik merupakan seiring oleh bertambahnya taraf pengetahuan dan pendidikan warga, dengan berdasarkan efek globalisasi, tidak dikhususkan dalam taraf pemerintahan terendah contohnya desa. Pelaksanaan *good governance* pada tingkat desa adalah salah satu solusi untuk *bad governance* yakni pemerintahan desa yang di dominasi para kepala desa serta elit desa, tidak lain pada berbasis partisipasi warga, akuntabilitas, transparansi serta responsitas yang terbatas.

Untuk meningkatkan kualitas kinerja pemerintahan yang efektif serta efisien, maka dibutuhkan waktu dalam memikirkan bagaimana menggapai kesatuan kerjasama hingga dapat membangun kepercayaan masyarakat. Maka dari itu, dibutuhkan otonomi maupun kebebasan untuk memperoleh keputusan memberi sumber daya, mewujudkan prinsip pelayanan, anggaran, tujuan maupun target kinerja yang jelas serta terukur. Pemerintahan daerah pada praktek pengelolaan pengimplementasian prinsip pemerintahan yang baik. Kepemerintahan yang baik adalah sistem pengelolaan kekuasaan untuk menyiapkan barang ataupun jasa publik merupakan prinsip efektifitas, keadilan, partisipasi, akuntabilitas, serta transparansi.⁹

Agar harapan tersebut dapat terwujud, harus memiliki sikap integritas, profesionalisme, moral dan etos kerja yang tinggi. Pemerintah didirikan dengan tujuan dalam mewujudkan kemajuan serta memelihara sistem ketertiban sosial maka dari itu orang dapat hidup normal pada konteks kehidupan bernegara.

⁸Ari Dwipayana.Op.cit.hal.6-7.

⁹Pelayanan Publik. Yogyakarta: Gadjaja Mada Universitas Press.

Pelayanan publik ialah perwujudan maupun susunan kegiatan pada rencana memenuhi kebutuhan pelayanan sesuai pada peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara serta penduduk atas barang, jasa, maupun pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik yaitu setiap institusi penyelenggaraan Negara yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.

Kepala desa ialah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas serta kewajiban dalam melaksanakan rumah tangga desanya maupun melakukan tugas dari pemerintah pusat ataupun daerah.

Pembangunan di desa tidak lepas pada peran semua warga desa, maka dari itu kinerja seorang Kepala Desa sebagai pemimpin harus bisa melaksanakan maupun indikator untuk menciptakan pemerintah yang baik untuk memimpin serta mengelola pemerintah Desa untuk menjalankan desanya.

Beberapa karakteristik *good governance* yaitu :¹⁰

1. Partisipasi, artinya setiap orang berhak memiliki hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam pengelolaan pemerintahan.
2. Transparansi, artinya keterbukaan dalam aspek seluruh aktivitas yang menyangkut wilayah desa
3. Berkeadilan, artinya adil dalam memberi kesempatan yang sama tanpa memandang genre apapun.
4. Akuntabilitas, harus bertanggung jawab dalam mengambil keputusan
5. Efektivitas serta efisien, artinya seluruh proses pengelolaan harus sesuai dengan kebutuhan serta memanfaatkan dengan sebaik-baiknya pada sumber yang ada.

Desa Bandar Rejo ialah salah satu desa yang sudah bisa dikatakan berhasil untuk melaksanakan pemerintahannya dengan menggunakan rancangan-rancangan dari *good governance*, yakni salah satu desa terletak di Kecamatan Bandar Masilam Kabupaten Simalungun, adalah desa Bandar Rejo yang bisa

¹⁰Sirajuddin *Hukum Pelayanan Publik, Berbasis Partisipasi dan Keterbukaan Informasi*. (Jakarta: Setara Press. 2012). h. 12

dilihat dari pemilihan Kepala Desa tahun 2020 yang taraf kontribusi politiknya masyarakat melambung tinggi serta berlangsung dengan terbuka maupun demokratis. Di 2021, untuk melaksanakan pemerintahan desa, desa Bandar Rejo mendapat peningkatan yang demikian baik dari sebelumnya, dari segi pembangunan, tingkat demokrasi cukup tinggi, partisipasi masyarakat, maupun pelayanan-pelayanan yang begitu memadai kepada warga, contohnya partisipasi masyarakat untuk pelaksanaan pemerintahan serta pembangunan desa, dengan ini peraturan yang tertera didalam desa harus dimusyawarahkan kepada warga desa yang bersifat transparan agar bisa diketahui semua warga. Untuk melaksanakan pemerintahannya warga selalu ikut serta dengan terdapatnya akses maupun kontrol terhadap pembangunan desa, yang bersifat demokratis agar tidak terjadi kekuasaan golongan atas pemerintahan, seperti Kepala Desa ataupun BPD, agar mencapai segala harapan warga.

2. Rumusan Masalah

Berlandaskan penjelasan di atas saya akan menjelaskan persoalan pada penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana strategi Kepala Desa dalam mewujudkan Tata kelola yang baik (*Good governance*)?
2. Apa saja faktor penghambat dan pendukung terwujudnya tata kelola yang baik (*Good governance*) di dalam Kepemimpinan Kepala Desa?

3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana strategi Kepala Desa dalam mewujudkan Tata kelola yang baik (*Good governance*).
2. Untuk mengetahui apa saja faktor penghambat serta pendukung terwujudnya tata kelola yang baik (*Good governance*) di dalam Kepemimpinan Kepala Desa.

4. Manfaat penelitian

Penelitian ini guna untuk membentuk ilmu pengetahuan serta menambah wawasan pada masyarakat mengenai strategi Kepemimpinan Kepala Desa Bandar Rejo dalam mewujudkan *Good governance*.

Penelitian ini di harapkan bisa menambah pemikiran pada salah satu keilmuan pada ilmu kepemimpinan ataupun sebagai salah satu syarat untuk

memperoleh gelar S.Sos pada Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam UIN Sumatera Utara Medan.

5. Batasan istilah

Demi mengetahui pokok permasalahan penelitian ini, saya membuat batasan istilah terhadap judul penelitian saya yaitu:

1. Strategi

Maksudnya adalah kemampuan seseorang untuk mengantisipasi, memimpikan, mempertahankan fleksibilitas, berfikir secara strategis, dan bekerja dengan orang lain untuk memulai perubahan yang akan menciptakan masa depan yang lebih baik bagi organisasi.

2. Kepemimpinan

Maksudnya adalah tentang seseorang dalam memengaruhi orang lain atau bawahan yang berguna guna menggapai tujuan yang diharapkan seorang pemimpin.

3. *Good Governance*

Maksudnya merupakan pengelolaan tata kelola yang baik dalam mewujudkan pemerintahan yang berkualitas, bersih serta berwibawa.

4. Desa Bandar Rejo

Desa Bandar Rejo merupakan daerah yang berada di Sumatera Utara khususnya di Kabupaten Simalungun Kecamatan Bandar Masilam. Daerah ini mayoritas yang dihuni oleh etnis Simalungun dan Jawa.

6. Kajian Terdahulu

Beberapa penelitian yang dilakukan terdahulu yang dapat mendukung penelitian ini yaitu antara lain :

1. Penelitian Nurhayati A yasin, Abdurahman Pakaya, Lukfiah I Radjak yang berjudul, "Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat di Desa Tolinggula Pantai Kecamatan Tolinggula", yang merumuskan gaya kepemimpinan kepala desa dalam memimpin desa Tolinggula memiliki cara tersendiri yang cukup membuat

masyarakat puas dan senang. Kinerja kepala desa dalam pelayanan publik pada umumnya sudah baik, usaha kerja yang mereka selesaikan sudah mengarah pada pelayanan yang baik dan sudah sesuai yang diharapkan oleh masyarakat. Hal ini tertera menurut pendapat masyarakat desa Tolinggula Pantai langsung.

Adapun persamaan pada penelitian ini yaitu bagaimana gaya kepemimpinan kepala desa dalam memberikan pelayanan yang baik serta memuaskan kepada masyarakat. Dan perbedaan penelitian ini yaitu fokus di bagaimana strategi kepala desa dalam mewujudkan tata kelola yang baik sesuai dengan konsep yang telah disusun serta visi misi yang telah dibuat.

2. Skripsi karya Nurul Juli Chairiah yang berjudul “Peran Kepemimpinan Lurah dalam mewujudkan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik (*Good Governance*) pada Kelurahan Lalang Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi” yang hasilnya merumuskan peran kepemimpinan Lurah dalam mewujudkan Tata Kelola administrasi Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) bisa terbilang tercapai maupun tergapai. Hal ini terbukti dengan jawaban responden yang mengatakan bahwa motivasi maupun kedisiplinan Lurah untuk melaksanakan tugas serta wewenangnya sebagai pemimpin kelurahan sudah baik untuk membimbing staf pegawai kelurahan serta masyarakat, lalu ketepatan serta ketegasan Lurah untuk mengambil keputusan setiap ada masalah baik yang menimpa staff ataupun masyarakat Lurah mampu bertindak dengan benar menyelesaikan permasalahan yang ada serta Lurah sudah memberikan aturan-aturan yang baru untuk mengembangkan kelurahan, Lurah dalam menjalankan tugasnya kepada staff serta masyarakat sudah efektif serta efisien.

Adapun persamaan dalam penelitian ini yaitu bagaimana peran pemimpin desa dalam meningkatkan pelayanan yang baik untuk masyarakat serta efisien, dan perbedaan pada penelitian ini yaitu fokus pada proses penyelenggaraan tata kelola yang baik guna untuk memenuhi

kewajiban Kepala Desa Bandar rejo untuk mewujudkan Good Governance.

3. Penelitian Yani Alfian yang berjudul “ Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Kepada Masyarakat Di Desa Cipeundeuy Kabupaten Bandung Barat”, yang isinya merumuskan tentang permasalahan pelayanan masyarakat mengenai kualitas mutu pelayanan yang dimana seharusnya pemerintah desa sebagai penyedia jasa untuk bisa memberikan pelayanan yang baik. Hasil dari penelitian ini yaitu penyelenggaraan pelayanan publik di Desa Cipendeuy sudah terlaksana dengan maksimal, yaitu dengan dilakukannya beberapa upaya yang kongkrit oleh kepala desa yakni transparansi biaya, peningkatan disiplin, pelayanan yang baik, dan lain sebagainya.

Adapun persamaan dari penelitian ini yaitu, membahas bagaimana cara peningkatan mutu pelayanan pada masyarakat oleh kepala desa, serta perbedaan dengan penelitian ini yaitu terdapat fokus penelitian ini pada upaya kepala desa dalam mewujudkan tata kelola yang baik sesuai dengan prinsip pada Good Governance di kantor pemerintahan desa.

7. Metode Penelitian

Penelitian ini memakai jenis penelitian lapangan (*field research*) dimana suatu penelitian lapangan yang dilaksanakan dalam kawah aktivitas sesungguhnya.¹¹

Penelitian ini bersifat deskriptif menjelaskan sifat kondisi maupun peristiwa, sifat populasi ataupun wilayah tertentu yang mencari informasi faktual, justifikasi kondisi, menilai dan memperjelas situasi.¹²

¹¹Kartono Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandar: Madar Maju, 1996), Cet. KeVII, h,32

¹²Marzuki, *Metod Penelitian Bidang Bisnis Dan Social, Ekonosia*, Yogyakarta: Kampus Fakultas Ekonomi, UII, 2005, Cet. Ke.I. h.17.

1) Pendekatan penelitian

Pada penelitian ini saya memakai pendekatan kualitatif artinya sejenis metode yang menekankan aspek pemahaman lebih menyeluruh akan pokok masalah.¹³ Artinya data yang digabungkan pada penelitian tidak berbentuk angka-angka tetapi hasil wawancara terhadap narasumber, dokumen pribadi, dokumen resmi maupun catatan lapangan.

2) Subjek penelitian

Subjek penelitian yaitu kawasan, orang atau benda yang diamati sebagai target penelitian seperti Kepala Desa, Sekretaris Kepala desa, Kepala Dusun di kantor Desa Bandar Rejo serta Perwakilan Masyarakat di Desa Bandar Rejo.

3) Informan Penelitian

Informan penelitian artinya orang atau pelaku yang memahami serta mengetahui masalah, dan terlibat langsung dalam permasalahan penelitian. Adapun informan penelitian :

- a. Kepala desa di Kantor Desa Bandar Rejo
- b. Sekretaris desa di Kantor Desa Bandar Rejo
- c. Kaur Pemerintahan di Kantor Desa Bandar Rejo
- d. Kepala Dusun di Desa Bandar Rejo
- e. Ketua Perwiran Ibu-Ibu di Desa Bandar Rejo selaku perwakilan masyarakat yang bersedia untuk ikut serta dalam memenuhi data penelitian ini

4) Lokasi Penelitian

Lokasi berkaitan dengan masalah penelitian merupakan sumber data yang berguna untuk hasil penelitian, lokasi yang dimaksud ialah Kantor Lurah Desa Bandar Rejo Kecamatan Bandar Masilam Kabupaten Simalungun.

5) Sumber Data

¹³Amaruddin, “*Metode Penelitian Sosial*”, (Yogyakarta : Prana ilmu, 2016), hal.

Sumber data ialah pokok dasar data ditemukan. Terdapat dua, yaitu data primer serta data sekunder.¹⁴

a. Data primer

Adalah Data yang dikumpulkan sendiri secara pribadi melalui wawancara serta observasi.

b. Data sekunder

yakni data didapat secara cepat. Ketika penelitian ini yang sumber data sekundernya ialah aturan undang-undang, daftar pustaka, artikel, jurnal dan situs di internet yang berkenaan pada penelitian yang dilakukan.

6) Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data serta informasi yang diperlukan penelitian ini, penulis menggunakan teknik :

a. Observasi

Observasi artinya kegiatan mengamati secara langsung tujuan yang diteliti, pelaksanaan program maupun masyarakat yang menerima pelayanan metode pengumpulan data yang melalui pengamatan.¹⁵

b. Wawancara

Wawancara ialah menyatukan fakta dengan melangsungkan tanya jawab lisan, agar menemukan data serta informasi terkait penelitian. Dengan demikian kapasitas akhir wawancara di tentukan kepada pewawancara, responden, pertanyaan serta keadaan wawancara.¹⁶

c. Dokumentasi

Dokumentasi ialah informasi berlandaskan catatan penting dari lembaga maupun perorangan. Pada observasi saya

¹⁴Bagong Suyanto dan Sutinah.2006. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.hal.60.

¹⁵Ahsnuddin, Mudi, *Profesional Sosiologi*, (Jakarta: Mediatama, 2004), h.44.

¹⁶Kartono Kartini, *Pengantar Metodologi Riset*, (Bandung: Madar Maju, 1996)

melakukan pengambilan gambar agar memperkuat hasil penelitian.

8. Analisis Data

Analisis data asrtinya tahapan mencari secara sistematis data didapat dari kesimpulan wawancara, notasi, dokumentasi yang memasukkan data ke kategori menjadi bagian serta melakukan aliansi kemudian mengatur model serta memilih bagian penting yang dipelajari dan menghasilkan kesimpulan kemudian dipahami.

9. Sistematika Penulisan

Demi memudahkan pembaca dalam memahami penulisan ini, penulis akan memaparkan dalam 5 bab ialah :

BAB I : PENDAHULUAN

Untuk BAB ini memaparkan antaranya latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian serta manfaat penelitian, kajian terdahulu, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN TEORITIS

Untuk BAB ini akan memaparkan dari defenisi Strategi, Kepemimpinan, Kepala Desa serta Tata kelola pemerintahan yang baik.

BAB III : DESKRIPSI PEMERINTAHAN DESA BANDAR REJO

Untuk BAB ini memaparkan antaranya gambaran umum Desa Bandar Rejo, profil Desa Bandar Rejo, dengan memaparkan letak dan keadaan geografis.

BAB IV : HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Untuk bagian ini akan membahas kajian kepada data-data yang sudah disediakan terkait pada strategi Kepala Desa dalam

mewujudkan good governance di Desa Bandar Rejo Kecamatan Bandar Masilam Kabupaten Simalungun.

BAB V : PENUTUP

Dalam bagian terakhir saya menjelaskan rangkuman dari bagian-bagian terdahulu pada BAB sebelumnya sehingga menjadi kesimpulan yang meliputi pokok-pokok pembahasan, serta saya memberikan saran yang sekiranya dapat memberikan evaluasi maupun motivasi untuk penulis serta pembaca.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN